

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PERKARA PERCERAIAN OLEH PENGADILAN AGAMA

Oleh
Reva Setianingsih
NIM. 2205040052

ABSTRAK

Penerapan asas keterbukaan informasi di lingkungan peradilan bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Namun, dalam perkara perceraian, penerapan asas tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan hak privasi para pihak, mengingat perkara perceraian memuat informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi dalam publikasi perkara perceraian oleh Pengadilan Agama serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi dalam publikasi perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi hukum dan metode penelitian yuridis normatif. Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta sumber hukum lainnya digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian didukung melalui wawancara dengan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menemukan perlindungan data pribadi dalam publikasi perkara perceraian telah diterapkan sejak tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan secara tertutup, hingga publikasi putusan melalui penerapan anonimisasi terhadap identitas para pihak serta pembatasan informasi yang dipublikasikan. Mekanisme tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat pengungkapan identitas para pihak maupun informasi mengenai alasan perceraian melalui media massa yang berpotensi melanggar hak privasi, menimbulkan kerugian, serta berdampak terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak. Pihak yang dirugikan dapat menempuh tindakan hukum sesuai ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku jika pengungkapan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, dibutuhkan penerapan perlindungan data pribadi secara lebih optimal oleh Pengadilan Agama, media massa, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyebarluasan informasi perkara agar tercipta keseimbangan antara keterbukaan informasi serta perlindungan hak privasi para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Keterbukaan Informasi, Pengadilan Agama, Perkara Perceraian

LEGAL ANALYSIS OF PERSONAL DATA LEAKS IN THE PUBLICATION OF DIVORCE CASES BY RELIGIOUS COURTS

By
Reva Setianingsih
NIM. 2205040052

ABSTRACT

The application of the principle of information transparency in the judiciary aims to achieve transparency, accountability, and public trust in the administration of judicial power. However, in divorce cases, the application of this principle must be carried out in a balanced manner while still paying attention to the protection of personal data and the privacy rights of the parties, considering that divorce cases contain personal and sensitive information. This study aims to analyze the forms of personal data protection in the publication of divorce cases by Religious Courts and analyze legal protection against personal data leaks in the publication of divorce cases. This study uses a legal regulatory approach and normative juridical research methods. A review of relevant laws and other legal materials was used to collect data, which was then supported by interviews with Religious Courts. The study found that personal data protection in the publication of divorce cases has been implemented from the case registration stage, through closed trial examinations, to the publication of decisions through the application of anonymization of the parties' identities and restrictions on published information. This mechanism is implemented based on the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 2-144/KMA/SK/VIII/2022 concerning Standards of Information Services in Courts and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, this study found that in practice, there is still disclosure of the identities of the parties and information regarding the reasons for divorce through the mass media, which has the potential to violate privacy rights, cause harm, and impact the social and psychological lives of children. Aggrieved parties can take legal action in accordance with applicable laws and regulations if such disclosure is made unlawfully and causes harm. Therefore, more optimal implementation of personal data protection is needed by Religious Courts, the mass media, and all parties involved in disseminating case information to create a balance between information transparency and protection of the parties' right to privacy.

Keywords: Personal Data Protection, Information Transparency, Religious Courts, Divorce Cases